

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi SKH Kompas

Informasi media tempat penelitian ini dilaksanakan berguna untuk mengetahui latar belakang pemikiran pekerja media serta alur kerja yang terjadi di media tersebut.

Data mengenai surat kabar harian Kompas peneliti dapatkan dalam *company profile* yang diperoleh pada pusat data Kompas, Lantai 4 Gedung Kompas Gramedia Jalan Palmerah Jakarta Selatan. Beberapa data juga didapat dari sumber buku St. Sularto.

A.1. Sejarah Berdirinya SKH Kompas

Harian Kompas diterbitkan pada tahun 1960 atas prakarsa dua orang yakni Petrus Kanisius Ojong (atau yang biasa disingkat PK Ojong) dan Jakob Oetama. Kedua orang ini memiliki kesamaan yakni pernah menjadi guru dan memiliki minat di bidang sejarah. PK Ojong adalah pemmpin redaksi *Star Weekly* dan Jakob Oetama pada saat itu adalah pemimpin redaksi majalah *Penabur*. Keduanya bertemu dan membahas mengenai kesulitan masyarakat Indonesia dalam membaca format media majalah terutama yang berasal dari luar negeri. Keduanya memprakarsai berdirinya majalah *Intisari* yang menjadi tonggak awal berdirinya kerajaan Gramedia Majalah dan juga koran Kompas.

Kompas dalam sejarah pendiriannya juga melibatkan Presiden Soekarno. Pada saat itu Presiden meminta Jakob dan PK Ojong mendirikan sebuah surat kabar untuk menampung aspirasi masyarakat. Awal mula nama yang akan digunakan adalah “Bentara Budaya”, namun Presiden Soekarno lebih memilih “Kompas” karena berfilosofi sebagai penunjuk arah bagi masyarakat. Maka didirikanlah harian umum Kompas yang kala itu dicap sebagai medianya partai Katolik.

Saat ini Kompas berada dalam satu struktur manajemen Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Inti dari bisnis perusahaan ini adalah media. Pertama adalah majalah kemudian merambah ke koran dan saat ini juga merambah pada media siaran dan internet. Bisnis KKG kemudian berkembang tidak hanya media namun ke percetakan, toko buku dan akhirnya pada usaha *related bisnis*.

Harian Kompas terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965 dengan moto “Amanat Hati Nurani Rakyat” yang tetap digunakan hingga hari ini. Awal terbit Kompas hanya berjumlah 4 lembar tanpa warna yang terdiri dari sebelas berita luar negeri dan tujuh berita dalam negeri. Kompas digambarkan sebagai sebuah perwujudan Indonesia mini, sebuah gambaran masyarakat majemuk Indonesia. Kompas senantiasa berfokus pada penghargaan yang setinggi-tingginya pada harkat manusia dan kemanusiaannya. Cita-cita ini yang kemudian menjadi tolak ukur pengembangan institusi Kompas selanjutnya.

Dalam pusat data *Company Profile* harian Kompas, kedua pendiri harian ini selalu terjun ke lapangan pada awal pendirian media. Mereka selalu berusaha agar mutu dan kualitas Kompas terjamin dari hari ke hari. Pada masa-masa

awalnya harian Kompas dicetak di Eka Grafika dan kemudian pindah ke Percetakan Masa Merdeka. Perpindahan tempat cetak ini untuk menanggulangi permasalahan cetak dan peningkatan kualitas cetak. Oplah Kompas kemudian ikut menanjak menjadi 8003 ekseplar setelah berpindah tempat cetak.

Tantangan pada masa awal pendirian Kompas adalah ketepatan waktu dalam produksi percetakan koran. Permasalahan ini menyebabkan Kompas sering kali telat sampai di tangan pembaca. Ketelambatan sering sampai pada tengah hari sehingga para pembaca menjuluki *Komt Pas Morgen* (datang esok hari). Permasalahan ini juga mengubah sub judul Kompas yang sebelumnya “Harian Pagi Untuk Umum” menjadi “Harian untuk Umum”.

Semasa berdirinya Kompas pun tidak lepas dari kondisi politik bangsa Indonesia yang saat itu sedang kacau balau. Kompas menjadi salah satu “korban” pada pembredelan media massa tahun 1965 pada saat Gerakan 30 September. Pada tanggal 2 Oktober 1965 Kompas dan juga media lainnya dilarang terbit oleh Penguasa Pelaksana Perang Daerah Jakarta Raya agar menjaga berita yang simpang siur soal Gerakan 30 September. Pada tanggal 6 Oktober 1965 Kompas kembali terbit.

Larangan terbit kembali dirasakan Kompas pada masa Orde Baru tepatnya pada saat peristiwa demo mahasiswa tahun 1978. Mahasiswa menolak pencalonan kembali Suharto sebagai Presiden. Pada tanggal 21 Janyari 1978 Kompas bersama media lain seperti Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesia Time, Sinar Pagi dan Sore dilarang terbit. Ini dikarenakan pemberitaan Kompas yang berlebihan terhadap aksi demo mahasiswa tersebut. Setelah pemred

media-media tersebut menuliskan surat permohonan maaf dan berjanji untuk mengkoreksi diri maka Kompas kembali terbit pada tanggal 4 Februari.

Pada tahun 2000 hingga 2009, arah usaha Kompas berubah ke media internet dan televisi. Ini ditandai dengan peluncuran Kompas.com pada awal tahun 2000. Kompas.com ini berada di bawah manajemen Kompas Cyber Media sebagai anak perusahaan.

Kemudian pada tahun 2000, Kompas masuk ke industri siaran televisi dengan mendirikan TV 7. Setelah berjalan baik selama 6 tahun, pada tahun 2006 TV 7 diakuisisi oleh Trans Corp Media dan kemudian berganti nama menjadi Trans 7.

Bisnis Kompas Gramedia di bidang siaran tidak berhenti di situ saja. Pada tahun 2009 Kompas mendirikan Kompas.TV yang menasar pada pasar televisi berbayar. Jaringan dan produk Kompas yang beragam ini menyebabkan banyaknya pilihan bagi konsumen Kompas. Produk lain yang masih dalam pengembangan adalah Kompas Gramedia Channel, Kompas Gramedia Production dan Kompas Gramedia Vission (KompasGramedia.com. <http://www.kompasgramedia.com/aboutkg/history>. akses 13 Juni 2011)

A. 2 Visi dan Misi SKH Kompas

Visi dan misi harian Kompas terdapat di slogan mereka yang berbunyi “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Hal ini menggambarkan tujuan untuk menyuarakan suara sesuai dengan hati nurani rakyat. Harian Kompas ingin menjadi sebuah perwujudan “Indonesia Mini” dimana harian ini mengedepankan

keterbukaan, meninggalkan pengelompokan latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Kompas tentu saja ingin berperan aktif memajukan dan mencerdaskan bangsa. (Sularto, 2007:53)

Harian ini menempatkan nilai kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, berfokus pada nilai-nilai transenden atau mengatasi kepentingan kelompok. Hal ini dirumuskan sebagai *humanisme transcendentale*. Kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang disempurnakan, transenden, yang percaya kepada Allah. Kemanusiaan yang bukan kemanusiaan sosialis, komunis, sekuler, tetapi kemanusiaan yang dilengkapi dengan kepercayaan kepada Allah, dan nilai-nilai ilahi yang menyempurnakan perikemanusiaan. Beriman artinya lebih daripada percaya pada satu sistem. Iman artinya percaya kepada keabadian-Nya. Humanisme transcendentale juga berarti Allah yang akan menyempurnakan kegiatan manusia tidak mempunyai tangan lain dari pada tangan-tangan manusia dalam proses menuju kesempurnaan.

Rumusan visi dan misi Kompas pada tahun 2007 dan 2008 adalah “Menjadi Agen Perubahan Dalam Pembangunan Komunitas Indonesia yang lebih Harmonis, Toleran, Aman dan Sejahtera, dengan Mempertahankan Kompas Sebagai Market Leader Secara Nasional Melalui Optimalisasi Sumber Daya Serta Sinergi Bersama Mitra Strategis”

A.3 Struktur Organisasi

PT. Kompas Gramedia Nusantara adalah lembaga media massa, dengan jabatan tertinggi adalah Pemimpin Umum, pemimpin umum dibantu oleh Wakil Pemimpin Umum Bidang Non Bisnis dan Wakil Pemimpin Umum Bidang Bisnis. Kemudian ada Pemimpin Redaksi yang mempunyai tanggung jawab pada bidang redaksi dan Pemimpin Perusahaan yang bertanggung jawab pada bidang bisnis. Di bawah pemimpin redaksi terdapat Redaktur Pelaksana dan kemudian dibawahnya terdapat Kepala Desk, Kepala Biro, dan paling bawah adalah Reporter. Di bagian bisnis, di bawah Pemimpin Perusahaan terdapat General Manager Iklan, General Manajer Sirkulasi, dan General Manajer Marketing Communication.

Diantara kedua bidang (Bisnis dan Redaksi) terdapat bagian Penelitian dan Pengembangan, Direktorat SDM-Umum dan Teknologi Informasi. Mereka bersifat supporting dan dibawah supervisi Wakil Pemimpin Umum bidang Bisnis. Pembagian ini memudahkan pembagian kerja dan pada akhirnya berpengaruh pada mutu “produk” Kompas yaitu berita dan koran. Prosesnya terdiri dari beberapa tahapan :

a. Bidang Redaksi

1). Perencanaan

Rapat pagi dilaksanakan untuk merencanakan berita-berita yang akan dimuat dan liputan yang akan berlangsung. Peliputan berasal dari tiap-tiap desk Kompas serta penetapan event tertentu, juga peliputan yang berasal dari undangan. Berita akan disesuaikan dengan aktualitas peristiwa yang terjadi.

2). Pengorganisasian

Redaktur mengkoordinir para wartawan untuk mencari dan menulis berita sesuai dengan yang direncanakan dalam rapat pagi dan menunjuk wartawannya untuk mengerjakan tugas-tugas pencarian tersebut.

3). Pelaksanaan

Rapat sore dilaksanakan untuk menetapkan berita yang akan dimuat dalam surat kabar esok hari. Dan membuat *head line* berita. Bila data belum cukup lengkap maka akan dicari kembali sampai batas waktu pukul 23.00. Sebelum dicetak akan melalui proses penyuntingan dan kemudian pada pukul 01.00 akan dicetak

4). Evaluasi

Evaluasi dilakukan di tiap-tiap desk/bidang redaktur. Selain itu dilakukan juga evaluasi berdasarkan masukan dari pembaca yang menelepon atau mengirim fax/email. Evaluasi akan dibahas pula dalam rapat mingguan (hari Rabu) sebagai dasar perencanaan yang akan dibahas dalam rapat pagi. Evaluasi akan melihat segi percetakan susunan huruf dan kata-kata, bentuk dan susunan berita pada setiap halaman dan isi berita.

b. Bidang Direktorat SDM – Umum

Hubungan kerja yang baik antar personal di Kompas Gramedia akan berdampak positif pada kinerja perusahaan. Hubungan antar personal yang bersifat kekeluargaan, terbuka dan tidak kaku. Dalam hal kerja dan urusan administrasi terjadi hubungan formal dan berjenjang untuk menunjukkan fungsi kerja. Direktorat SDM – Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi

bidang Umum, Penerimaan dan Penempatan, Remunerasi (kesejahteraan), serta Pendidikan dan Pelatihan.

1). Bidang Umum

Bidang ini berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk setiap karyawan agar mendapatkan kenyamanan dalam melakukan tugasnya. Ruang kerja yang memadai dan peralatan kerja disediakan oleh perusahaan.

2). Bidang Penerimaan dan Penempatan

Bidang ini bertugas untuk merekrut calon karyawan dan menempatkan di unit yang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Perkembangan dari calon karyawan sampai pesiun menjadi tanggung jawab dari bagian ini.

3). Bidang Kesejahteraan (Remunerasi)

Bidang ini mengurus kesejahteraan karyawan, misalnya tunjangan perumahan, cuti, sekolah, dokter dan obat-obatan.

4). Pendidikan dan Pelatihan

Unit ini mempersiapkan calon karyawan untuk memasuki dunia kerja di bidangnya. Training untuk meningkatkan kualitas SDM atau karyawan menjadi tanggung jawab unit ini.

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Kepada bidang ini berkedudukan sama dengan Pemimpin Redaksi, bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin Umum SKH Kompas. Kepala Litbang membawahi 4 bidang kedudukan sejajar.

1). Pusat Informasi Kompas

Pusat informasi Kompas dipimpin oleh seorang manajer yang membawahi tiga bagian yakni :

- a) Bagian Akuisisi : bagian pengadaan dan perawatan bahan pustaka
- b) Bagian pengolahan Arsip Elektronik : mencakup kegiatan pengolahan SKH Kompas dan Informasi dari sumber lain ke dalam bentuk elektronik
- c) Bagian Layanan Informasi : bagian ini merupakan kegiatan layanan informasi dan kegiatan sirkulasi.

Pusat Informasi Kompas adalah unit yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan melakukan temu kembali informasi yang dibutuhkan. Pusat Informasi Kompas tidak hanya sekedar pusat dokumentasi namun merupakan pusat informasi yang berfungsi untuk mendukung kinerja redaksi dalam menerbitkan Kompas. Secara rinci tugas tersebut terdiri atas :

- a) Mengembangkan koleksi baik buku terbitan secara berkala maupun data terolah
- b) Mengelola arsip Kompas dan beberapa terbitan berkala yang dipilih berdasarkan kebutuhan redaksi ke dalam bentuk arsip elektronik
- c) Memberikan informasi untuk internal yaitu wartawan dan karyawan yang tergabung dalam Kompas Gramedia serta melayani masyarakat umum.

2). Pusat Penelitian Kompas (Puslitkom)

Unit ini dipimpin oleh seorang manajer yang tugasnya adalah melakukan penelitian dari hasil kerja redaksi yang hasilnya diserahkan pada

bagian produksi. Penelitian dilakukan dengan bantuan mahasiswa dengan mengadakan polling terhadap pelanggan Kompas dan masyarakat umum.

3). Pusat Penelitian Bisnis (Puslitbis)

Bagian ini dipimpin oleh seorang manajer yang bertugas untuk menangani riset pasar dan konsumen, memantau pendapat masyarakat terhadap perubahan Kompas dan mengadakan penelitian terhadap kemungkinan pengembangan Kompas. Forum pembaca Kompas selama ini dibina untuk memberi masukan pada Kompas.

4). Database

Seorang manajer database memimpin bagian ini agar data SKH Kompas senantiasa selalu diperbaharui demi kepentingan kemajuan penelitian Kompas. Biodata tokoh-tokoh penting baik dalam dan luar negeri selalu diperbaharui demi kepentingan data yang akurat dalam penulisan berita. Database juga membuat profil seluruh kabupaten di Indonesia.

d. Bidang Teknologi Informasi

Pada tahun 1996 Kompas mendirikan bagian ini dan menstrukturisasinya pada tahun 2003. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya teknologi yang tepat dan cepat, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Bidang ini diarahkan untuk memberikan pelayanan yang tuntas dalam bidangnya dan tidak berorientasi pada teknologi saja.

Guna mewujudkan hal tersebut, bidang ini membentuk tim kerja dalam melaksanakan tugasnya. Ada beberapa tim yang bertugas untuk menangani jasa layanan data, ada yang bertugas mengantarkan data tersebut. Keduanya bekerja

bersama dalam satu proyek rutin didukung oleh Senior Analis, Staf Sekretariat, Administrasi dan Gudang. Secara struktur tim ini dipimpin oleh General Manajer, dan masing-masing memiliki keahlian dipimpin oleh manajer, yaitu *Software and Application, Hardware and Infrastructure*, serta *Helpdesk and Support*.

e. Bidang Bisnis

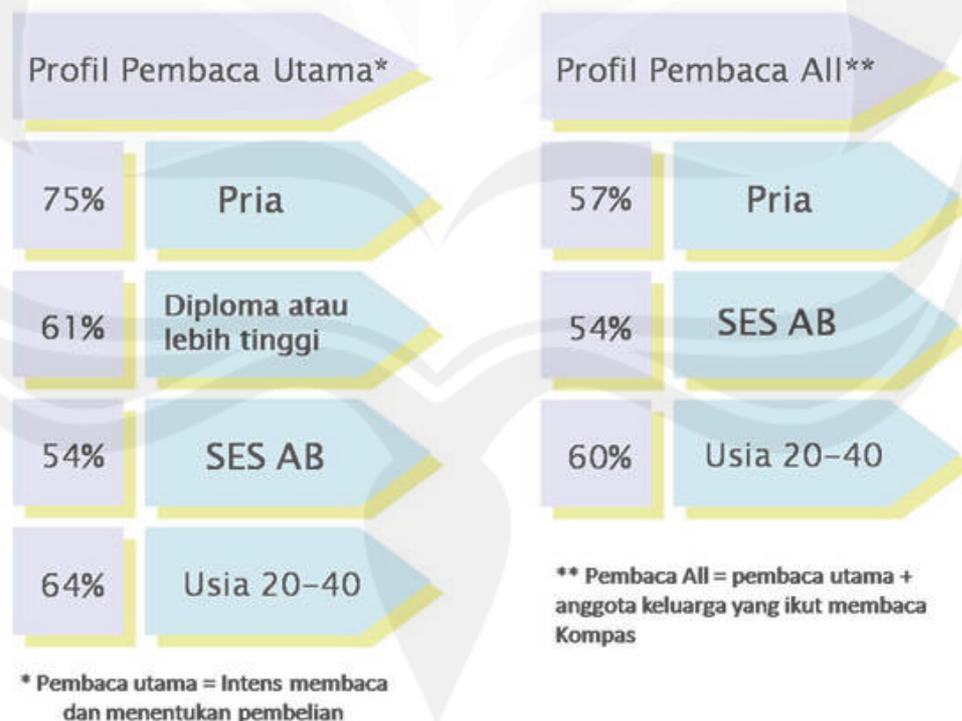
Kebutuhan informasi masyarakat saat ini telah berkembang, tidak hanya membutuhkan fakta, namun sebuah petunjuk yang mengarahkan fakta tersebut baik untuk dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Hal ini dalam usaha penerbitan Kompas, mulai dikembangkan pemikiran yang tidak hanya didasarkan pada orientasi produk tetapi bergerak sampai pada jarak tertentu ke orientasi pasar. Artinya dalam membuat produk, ditingkatkan kesadaran dan pemikiran terhadap situasi pasar maupun perkembangan kebutuhan konsumen mengenai informasi. Fungsi dari bidang bisnis antara lain :

- a) Bertanggung jawab dan berkewajiban menjadikan lembaga Kompas menjadi badan usaha komersial yang sehat
- b) Mengatur pendapatan dan pembiayaan kegiatan usaha agar media sebagai produk laku dijual
- c) Memantapkan agar unit dan personilnya sebagai institusi sosial yang punya nilai ekonomis dan kemasyarakatan
- d) Mengedarkan produk agar bisa dikonsumsi pada saat pembaca membutuhkannya.

Berdasarkan statistik Litbang Kompas 2008, jumlah oplah SKH Kompas nasional sebanyak 507.000 eksemplar. Luas wilayah peredaran meliputi nasional menyebabkan Kompas tetap terdepan dalam bisnis media.

Profil pembaca SKH Kompas yang terbesar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas (SES AB sebanyak 54%). Pembaca SKH Kompas terbanyak berasal dari usia produktif 20 hingga 40 tahun (sebanyak 64%). Secara keseluruhan profil utama pembaca SKH Kompas adalah kalangan akademisi dengan gelar diploma hingga doktoral (sebanyak 61%).

BAGAN 2
Profil Pembaca Kompas



Sumber : KompasIklan.com / angket pembaca Kompas 2008

B. Berita Konferensi Kopenhagen 2009

Berbicara mengenai permasalahan lingkungan tidak akan ada habisnya jika kita membahasnya satu demi satu. Permasalahan lingkungan adalah permasalahan yang kompleks. Lingkungan tidak hanya berupa alam, namun juga kegiatan manusia di dalamnya. Kegiatan manusia tersebut berupa ekonomi, sosial dan budaya.

PBB sebagai badan dunia sejak tahun 80an mengadakan pertemuan yang membahas soal perubahan iklim ini. Pada tahun 1992 di Rio de Janeiro diadakan Konferensi perubahan iklim pertama. Dua tahun kemudian lahirlah Protokol Kyoto yang berisi kesepakatan pengurangan karbon yang disetujui negara-negara dunia, terkecuali Amerika Serikat dan sekutunya.

Tahun berganti, Protokol Kyoto sudah sampai pada akhir tugasnya pada tahun 2012. Pertemuan tingkat tinggi membahas perubahan iklim digelar di Kopenhagen tahun 2009. Konferensi ini yang lebih dikenal dengan *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, sebelumnya telah sukses digelar di Bali pada tahun 2007. Pada Konferensi di Bali tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan mengenai penanggulangan perubahan iklim.

Isi perjanjian tersebut dinamakan *Bali Roadmap*, yang intinya adalah adanya upaya untuk melindungi negara-negara berkembang dari ancaman perubahan iklim dengan membuat negara-negara maju di bidang ekonomi membantu negara berkembang. Perjanjian yang meliputi upaya adaptasi (penyesuaian dengan perubahan lingkungan) dan mitigasi bencana (penganggulangan bencana) perubahan iklim di negara berkembang menjadi isu

yang hangat dibicarakan dalam Konferensi perubahan Iklim Bali 2007. Selain itu juga dimunculkan pentingnya hutan sebagai salah satu “senjata” melawan perubahan iklim. Program yang digunakan untuk melindungi hutan adalah REDD (*Reducing emissions from deforestation in developing countries*). Program ini digaungkan karena kebanyakan hutan didunia dimiliki oleh negara berkembang, dimana masalah negara berkembang adalah kemiskinan dan pemanfaatan hutan yang sembarangan. Negara maju diharapkan membantu dalam perekonomian agar hutan di negara tersebut tidak dieksploitasi.

Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen 2009 diselenggarakan atas prakarsa PBB sebagai badan dunia yang melihat persoalan perubahan iklim ini mendesak untuk ditanggulangi bersama seluruh warga dunia. Berbekal hasil perjanjian *Bali Roadmap* maka diharapkan hasil konferensi ini akan mendapatkan jalan keluar terhadap kepentingan seluruh negara di dunia. Konferensi Kopenhagen 2009 ini juga menjadi pertemuan terakhir untuk menciptakan perjanjian baru yang mengikat setelah Protokol Kyoto yang berakhir pada tahun 2012.

B.1 Situasi Konferensi Kopenhagen 2009

Harapan dari banyak pihak pada Konferensi Kopenhagen 2009 yang menginginkan kesepakatan baru untuk mengganti protokol Kyoto sedikit terganggu dengan beberapa kabar. Sebelumnya antara pemerintah negara-negara berkembang dan negara maju masih bersitegang dengan kesepakatan pengurangan karbon yang dianggap tidak adil. Cina dan India yang sedang membangun

ekonominya merasa tidak adil dengan pemotongan karbon mereka yang disamakan dengan negara maju.

Permasalahan di Kopenhagen dapat dikelompokkan menjadi 2 masalah utama. Pertama sasaran penurunan emisi karbon agar suhu bumi tidak sampai naik 2 derajat celcius. Ini membuat perbedaan angka di tiap-tiap negara dan pertentangan dari negara maju karena khawatir dengan perekonomian mereka. Kedua, setelah disepakati masalah yang muncul adalah kesepakatan kerja sama dalam mitigasi dan adaptasi yang memerlukan transfer teknologi ramah lingkungan, pengembangan serta pendanaan yang cukup besar. (Emil Salim, 2010: 6)

B.2. Kepentingan Indonesia

Indonesia sebagai negara yang dipandang penting dalam percaturan perubahan iklim dunia memiliki agenda penting untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. Sebelumnya telah terjadi banyak anomali cuaca yang merugikan sebagian besar rakyat Indonesia. Cuaca yang tidak bisa diprediksi menyebabkan banya petani gagal panen. Ombak yang tinggi dan intensitas badai yang terus menerus menyebabkan nelayan di pesisir laut Indonesia menyerah untuk tidak melaut. Eksesnya adalah mereka kesulitan ekonomi dan beralih pada para lintah darat untuk berhutang. Sungguh suat lingkaran setan yang besar akibat perubahan iklim.

Indonesia mengharapkan adanya keuntungan yang diperoleh negara-negara berkembang dalam penyelamatan perubahan iklim. Menurut WWF Indonesia yang harus diperjuangkan Indonesia dalam Kopenhagen adalah

program REDD, kelautan, mitigasi dan pendanaan. Kelautan dipandang penting bagi Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Laut adalah teritorialnya yang paling luas. Sangat masuk akal jika laut menjadi salah satu yang diperjuangkan Indonesia dalam Konferensi Kopenhagen 2009.

Banyak pihak menilai setelah Indonesia berhasil menyelenggarakan *World Ocean Conference* (WOC), peluang untuk memperjuangkan laut di konferensi Kopenhagen 2009 terbuka lebar. Indonesia yang dipandang negara besar oleh negara-negara kepulauan kecil, mampu membawa kepentingan laut di konferensi.

Laut selama ini menjadi isu yang terpinggirkan. (Damanik. Kompas. 10 Desember 2009: 14). Laut memerlukan alat ukur yang lebih kompeten untuk memperlihatkan peran sertanya dalam menanggulangi perubahan iklim. Selama ini laut hanya dipandang sebagai pelepas karbon dan Indonesia menghabiskan waktu dalam memperoleh perhitungan untuk memperjual belikan laut sebagai penyerap karbon.

Seiring berjalannya waktu yang kian habis, kehidupan nelayan di pesisir tidak diindahkan pemerintah. Padahal merekalah yang pertama merasakan bencana perubahan iklim dengan perubahan musim dan naiknya permukaan air laut. Pemerintah juga melupakan ketahanan pangan kelautan. Keasaman air laut menyebabkan pemutihan karang yang merembet pada hilangnya ikan untuk dimakan. (Kompas, 11 Desember 2009: 14)

Keterkaitan lingkungan laut yang luas ini diharapkan dapat menjadi senjata utama Indonesia dalam perundingan dengan negara-negara maju. Negara

kepulauan tidak memiliki pilihan untuk menyelamatkan diri mereka. Kukungan laut dapat membuat mereka menjadi imigran dari tanah kelahirannya. Indonesia diharapkan dapat mendesak kelautan menjadi salah satu sektir yang diperhatikan dalam konferensi ini.

Halangan terbesar dalam konferensi Kopenhagen 2009 berasal dari negara-negara maju. Kesepakatan yang harus diciptakan adalah mengenai penurunan emisi setiap negara maju untuk memotong produksinya. Hal ini dinilai berat karena negara maju tidak ingin kehilangan kekuatan ekonominya dan beralasan beberapa negara berkembang juga merupakan produsen karbon besar. Apabila tidak ada kesepakatan yang baik antara negara maju dan juga negara berkembang maka Kopenhagen dipastikan gagal membawa kehidupan yang lebih baik.

Indonesia mengharapkan adanya kesepakatan memangkas karbon sebanyak 30 persen dari negara maju. Namun hal itu rupanya dipandang terlalu berat bagi banyak anggota negara industri. Dimotori oleh Amerika Serikat dan China, produsen terbesar karbon, perundingan berlangsung alot untuk mencapai kesepakatan soal angka carbon yang dipotong tersebut.

Indonesia melalui pidato Presiden Yudhoyono di hari terakhir Konferensi Kopenhagen menyampaikan angka 26% terhadap produksi karbon nasional. Meski Indonesia bukan negara yang diwajibkan memberikan angka karbon, langkah ini memicu negara-negara lain yang sebelumnya enggan memberikan angka pemotongan karbon mereka maju menegaskan angka pemotongan karbon nasional.

Tantangan yang dihadapi Indonesia sudah jelas. Apabila suhu bumi melampaui 2 derajat celsius, maka Indonesia akan menerima dampak seperti naiknya permukaan air laut (menenggelamkan ratusan pulau dan menghancurkan kehidupan pesisir), banjir, angin topan, musim kemarau yang panjang, hilangnya air tanah, rusaknya keanekaragaman hayati, munculnya penyakit baru dan sebagainya. (Salim, 2010: 11)

Hal lain yang diusahakan oleh Indonesia dalam konferensi ini adalah pendanaan terhadap program-program pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Indonesia mengklaim bahwa program penyelamatan lingkungan sudah dilakukan namun hanya tinggal menunggu pendanaan.

Program Indonesia terkait penyelamatan lingkungan berdasarkan pada proses adaptasi lingkungan. Adaptasi dinilai lebih mudah diterapkan dalam menghadapi problem perubahan iklim. Permasalahan di pesisir pun telah ada program yang akan dijalankan yakni adaptasi proteksi, akomodasi dan relokasi (Kompas, 3 Desember 2009:14). Adaptasi proteksi (melindungi) dilakukan dengan membangun tanggul atau hutan bakau untuk menghadang kenaikan muka air laut. Cara ini dilakukan Belanda dan Maladewa. Sementara itu, adaptasi akomodasi dapat dilakukan dengan membangun rumah atau gedung berkaki dengan kolong air di bawahnya. Bisa juga dengan membangun rumah terapung. Adaptasi relokasi berarti memindahkan hunian atau masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir yang tergenang air.

Pendanaan yang dijanjikan oleh negara-negara maju merupakan tragedi yang paling mudah di jangkau oleh Indonesia. Program REDD yang diajukan

Indonesia untuk mendapatkan pendanaan negara maju diberi syarat tambahan. Pemberian dana harus melalui proses MRV (*measurement, reportable and verifedable*) yang memberikan batasan tambahan pada negara berkembang.

Syarat ini dinilai oleh kelompok negara berkembang hanya alasan mengada-ada. Konsumsi karbon dari negara berkembang berbeda-beda, sehingga keperluan untuk pengukuran pendanaan seperti ini tidak valid. Ini berkaitan dengan misi kelompok G-77 (negara berkembang dan negara kepulauan) untuk menolak usulan mengurangi jumlah emisi nasional. (Kompas, 11 Desember 2009:14)

Ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian terkait target Indonesia dalam konferensi Kopenhagen 2009 ini. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili delegasi Indonesia berada di sisi berlawanan dengan organisasi non pemerintah dalam memandangi setiap hasil konferensi Kopenhagen 2009.

Para pengamat menilai Indonesia mudah larut dalam buaian janji negara maju terutama mengenai kesepakatan emisi yang harus dikurangi. Program REDD yang dijanjikan Indonesia adalah program yang belum diketahui akibatnya pada masyarakat tradisional di daerah perhutanan. Program yang menyelamatkan hutan untuk tidak ditebang ini tidak melihat faktor kehidupan masyarakat tradisional di sekitar hutan yang hidup dan bekerja dari hutan tersebut. Jika hutan tidak boleh ditebang, lantas kehidupan masyarakat yang tergantung dari hutan tentu akan terganggu. Perusahaan korporasi sebenarnya menjadi sorotan utama dalam penebangan hutan melalui izin penebangan yang diberikan pemerintah.

Indonesia diberi harapan negara di dunia untuk menjadi penengah dalam hal kesepakatan yang mampu menguntungkan negara berkembang. Namun banyak pihak, terutama lembaga non pemerintah (Ornop), melihat arah pembicaraan delegasi Indonesia hanya terkonsentrasi pendanaan cukup besar. Indonesia juga dianggap pintar mengambil hati negara maju (*hero image*) dengan mengajukan janji penurunan emisi diatas angka yang sebenarnya dibutuhkan pemerintah.

Padahal harapan yang diinginkan dari banyak pihak, Indonesia menaikkan posisi tawarnya bersama-sama dengan negara berkembang lainnya untuk menekan negara maju mengurangi emisinya. (Hadar, 7 Desember 2009:7). Pendanaan memang penting, namun bukan yang terutama. Jika menjadikan pendanaan terutama, sama saja artinya dengan membiarkan produksi karbon berlangsung.

Implikasi dari setiap Konferensi, baik Kopenhagen 2009 maupun konferensi-konferensi terdahulu dan yang akan datang, akan memakan waktu yang lama. Ini dikarenakan kebijakan yang dihasilkan dalam setiap konferensi membutuhkan waktu penerapan. Hasil dari kebijakan tersebut juga akan terasa dalam jangka waktu yang cukup panjang. Masyarakat juga kurang memahami maksud yang dihasilkan dari perjanjian-perjanjian konferensi perubahan iklim tersebut. (Murdiarso, 2003: 107)

Kondisi semacam ini, terutama di negara berkembang, sering terjadi karena prioritas kepentingan lingkungan masih rendah. Agenda lingkungan dalam agenda pembangunan sering tidak memiliki cukup sumberdaya untuk

dipublikasikan pada masyarakat. Upaya masyarakat terhadap isu baru ini perlu ditingkatkan. Peran media menjadi sangat penting untuk menyampaikan informasi pada masyarakat secara efektif. (Murdiyarso, 2003: 107)

Media juga berperan untuk mengawal jalannya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pada konferensi tersebut. Termasuk mengawasi penerapan di lapangan apakah sesuai dengan keadaan masyarakat atau tidak, membawa hasil yang positif atau tidak. Media menjadi tempat belajar masyarakat perihal permasalahan perubahan iklim.

Pemberitaan mengenai konferensi perubahan iklim di tahun-tahun sebelumnya dan akan datang sangat penting untuk terus dilaksanakan. Pengawasan, sumber informasi serta proses pembelajaran bagi masyarakat menjadi salah satu alasannya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menempatkan agenda nasional kita dalam konteks sebagai anggota masyarakat nasional. Tentu hal ini berdampak pada hasil yang didapat di konferensi Kopenhagen nantinya kita sebagai bagian masyarakat internasional mengimplementasikan hasil tersebut tidak dengan mengorbankan kepentingan nasional. (Murdiyarso, 2003: 108)